



## Implementation Of Accrual-Based Accounting System At Gomo Sub-District Office, Gomo District, South Nias Regency

### Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua Di Kantor Camat Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan

Titus Desman Hia <sup>1)</sup>; Dedi Irawan Zebua <sup>2)</sup>; Serniati Zebua <sup>3)</sup>; Sophia Molinda Kakisina <sup>4)</sup>

<sup>1,2,3,4)</sup> Universitas Nias

Email: <sup>1)</sup> [titushia07@gmail.com](mailto:titushia07@gmail.com) ;<sup>2)</sup> [dedizebua07@gmail.com](mailto:dedizebua07@gmail.com) ;<sup>3)</sup> [serniatizebua97@gmail.com](mailto:serniatizebua97@gmail.com)

<sup>4)</sup> [molindasophia@gmail.com](mailto:molindasophia@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [05 September 2025]

Revised [10 Januari 2026]

Accepted [16 Januari 2026]

#### KEYWORDS

Accrual Accounting,  
Government Accounting  
System, Sub-District Office.

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Kantor Camat Gomo serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual telah sesuai dengan ketentuan PP No. 71 Tahun 2010, di mana laporan keuangan yang disusun sudah memenuhi kriteria relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Namun, penerapan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan, dan kurangnya sarana pendukung. Secara keseluruhan, penerapan sistem ini sudah cukup baik, meskipun diperlukan peningkatan kompetensi aparatur dan optimalisasi sistem informasi untuk mewujudkan laporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan

#### ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the accrual-based accounting system at the Gomo Sub-District Office and to identify the challenges encountered in its application. A descriptive qualitative method was employed, with data obtained through interviews, observations, and documentation. The results show that the accrual-based accounting implementation has complied with Government Regulation No. 71 of 2010, and the financial reports produced meet the criteria of relevance, reliability, comparability, and understandability. However, challenges such as limited human resources, lack of training, and inadequate supporting facilities remain. In general, the implementation is satisfactory but still requires strengthening staff capacity and optimizing financial information systems to achieve more transparent, accountable, and useful financial reporting for decision-making

## PENDAHULUAN

Semenjak bergulirnya era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Sistem akuntansi merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan, baik di sektor publik maupun swasta. Di Indonesia, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di instansi pemerintah, termasuk di tingkat kecamatan, menjadi semakin mendesak seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.

Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mewajibkan atau mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di sektor publik. Ini termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Peraturan-peraturan ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk perubahan sistem akuntansi dari basis kas menuju sistem akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas entitas pemerintah. Sistem ini mengakui pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi, tidak hanya ketika kas diterima atau dibayarkan. Dengan demikian, sistem ini mampu mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan objektif. Penerapan akuntansi berbasis akrual menjadi tantangan bagi semua pihak dalam menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Penerapan ini juga berlaku pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri Dua sistem utama dalam akuntansi pemerintah pusat terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, serta Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dijalankan oleh kementerian maupun lembaga non-departemen.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pada tingkat instansi pemerintah. Laporan yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Keandalan laporan tersebut dapat dibuktikan melalui proses rekonsiliasi antara laporan yang disusun oleh Satuan Kerja (Satker) dengan data pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Setiap Satker diwajibkan menyampaikan laporan keuangan sesuai periode akuntansi yang berlaku dan tepat waktu kepada KPPN sebagai bentuk kepatuhan terhadap sistem akuntansi pemerintahan.

Pada tingkat daerah, termasuk kecamatan, penerapan akuntansi berbasis akrual masih menghadapi berbagai tantangan. Kantor Camat Gomo sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Nias Selatan juga diwajibkan melaksanakan kebijakan ini. Namun dalam realisasinya, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip akuntansi akrual, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta minimnya pendampingan teknis yang berkesinambungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti memilih untuk mengkaji Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Kantor Camat Gomo Kabupaten Nias Selatan. Hal ini didasari oleh fakta bahwa sistem tersebut belum sepenuhnya diterapkan di instansi tersebut. Padahal, penerapan akuntansi berbasis akrual penting dilakukan karena memungkinkan pencatatan transaksi keuangan pada saat terjadinya, bukan hanya ketika kas diterima atau dikeluarkan. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai posisi keuangan dan kinerja anggaran.

Permasalahan ini diperoleh peneliti melalui hasil wawancara dengan salah seorang pegawai tetap di Kantor Camat Gomo. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di instansi ini menjadi penting dilakukan. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk mengatasi berbagai kendala, sehingga pengelolaan keuangan di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal. (Ternalemta et al., 2021)

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Sistem akuntansi berbasis akrual

Akuntansi berbasis akrual dapat dipahami sebagai sistem pelaporan keuangan di mana suatu transaksi dicatat dan diakui pada saat terjadinya (real time), tanpa bergantung pada penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas. Pencatatan ini mencakup seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari suatu transaksi. Pemilihan basis akrual didasarkan pada kenyataan bahwa tujuan pelaporan keuangan tidak dapat sepenuhnya dipenuhi dengan basis kas. Secara khusus, akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mendukung fungsi manajerial dan pengawasan.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual juga dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan informasi yang dihasilkan oleh basis kas, sehingga data yang disajikan menjadi lebih akurat. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP, 2006:1) menegaskan bahwa laporan keuangan berbasis akrual mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan basis kas. Dengan sistem ini, biaya pelayanan publik dapat dihitung secara lebih tepat dan wajar sesuai dengan kebutuhan. Nilai yang dilaporkan tidak hanya berupa jumlah kas, melainkan juga mencerminkan seluruh beban yang muncul pada saat transaksi terjadi.

Keunggulan lainnya adalah pengukuran laporan keuangan menjadi lebih komprehensif, karena mencakup seluruh beban baik yang sudah dibayar maupun yang masih menjadi kewajiban. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual disusun secara tepat waktu dan dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban maupun perencanaan ke depan. Informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi juga dapat tercatat dengan baik, sehingga mendukung evaluasi terhadap kinerja pemerintah.



Oleh sebab itu, akuntansi berbasis akrual menjadi instrumen penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintahan. (Lubis & Nurlaila, 2022).

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di sektor pemerintahan merupakan bagian dari tuntutan baik secara global maupun nasional, yang bertujuan utama untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Kantor Camat Gomo, sebagai salah satu unit dalam struktur pemerintahan daerah, juga memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan standar tersebut. Dalam tinjauan pustaka ini, akan dibahas mengenai landasan teori, regulasi, manfaat, tantangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapannya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10), basis akrual adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi serta peristiwa keuangan pada saat terjadinya, tanpa mempertimbangkan kapan kas atau setara kas diterima maupun dibayarkan. Halim juga menegaskan bahwa basis akrual mampu mencapai tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, khususnya dalam hal fungsi manajerial dan pengawasan.

Namun, penerapan basis akrual dalam praktiknya tidak terlepas dari sejumlah permasalahan, di antaranya:

1. Penentuan akun serta nilai transaksi yang dicatat dalam jurnal sangat bergantung pada individu pencatat.
2. Relevansi akuntansi berbasis akrual menjadi terbatas jika dikaitkan dengan nilai historis maupun kondisi inflasi.
3. Dibandingkan dengan basis kas, penyesuaian dalam akuntansi akrual menuntut prosedur administrasi yang lebih kompleks, sehingga berimplikasi pada meningkatnya biaya administrasi.
4. Adanya potensi manipulasi keuangan yang relatif sulit untuk diawasi dan dikendalikan.

### **Perubahan sistem akuntansi instansi PP 24 tahun 2005 menjadi PP 71 Tahun 2010 atau dari cash toward accrual menjadi accrual basis**

#### **a. Basis Cash toward Accrual (CTA)**

Standar akuntansi pemerintah (SAP), yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 menggunakan basis modifikasi kas menuju akrual (Cash Towards Accrual) guna menjembatani penerapan basis kas menuju basis akrual kepada basis akrual secara penuh. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Basis kas menuju akrual ini melakukan pencatatan dengan cara menggunakan basis kas pada periode pelaksanaan anggaran (yaitu pendapatan diakui pada saat kas di terima Kas Negara dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Negara). Dan pada akhir periode diperlukan penyesuaian- penyesuaian untuk mencatat belanja harta tetap yang dilakukan pada periode pelaksanaan (dengan menggunakan metode kolorari), serta mencatat hak ataupun kewajiban negara.

Basis kas untuk pendapatan dan belanja yang dilakukan pada periode anggaran, akan menghasilkan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK), sedangkan pencatatan pada akhir periode (dengan jurnal kolorari) akan diperoleh Neraca. Aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan unsur neraca sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan unsur Laporan Realisasi Anggaran. Dengan kata lain, Neraca disajikan dengan basis akrual dan Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan basis kas. (Satya, 2023)

#### **b. Basis Akrual**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8) mendefinisikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagai standar yang mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam laporan keuangan berbasis akrual. Sementara itu, untuk pelaporan pelaksanaan anggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN maupun APBD. Penerapan SAP berbasis akrual berlaku bagi seluruh entitas pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun unit organisasi yang berada di bawahnya, sepanjang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyusun laporan keuangan (PP No. 71 Tahun 2010). Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaporan keuangan pemerintah menjadi lebih lengkap karena mencakup dua kelompok laporan utama, yaitu:

1. Laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
2. Laporan keuangan finansial (financial reports) yang mencakup Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (Putra & Varina, 2021)

**Tabel 1 Perbandingan antara sistem akrual dan kas**

Aspek	Basis akrual	Basis kas
pendapatan	Diakui saat hak atas pendapatan timbul	Transaksi dicatat ketika kas benar-benar diterima.
beban	Diakui saat kewajiban timbul	Diakui saat kas dikeluarkan
laporan	Mencakup LRA, LO, Neraca, dan Arus Kas	Fokus pada LRA
kelebihan	Akurat, komprehensif, sesuai realitas ekonomi	Mudah diterapkan, sederhana
Kekurangan	Rumit, butuh SDM dan sistem yang memadai	Kurang akurat, tidak mencerminkan utang/piutang.

Basis akrual bertumpu pada dua prinsip utama, yakni pengakuan pendapatan dan pengakuan beban/biaya. Dalam sistem ini, pendapatan diakui pada saat pemerintah memperoleh hak untuk menagih hasil dari suatu kegiatan, tanpa menunggu kas benar-benar diterima. Karena itu, kemungkinan munculnya piutang tak tertagih tetap ada, mengingat pendapatan sudah diakui meskipun kas belum diterima. Sementara itu, beban atau biaya diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk membayar. Dengan demikian, momen terjadinya kewajiban tersebut menjadi titik awal pengakuan beban, walaupun pembayaran sebenarnya belum dilakukan.

#### **Tujuan sistem akuntansi berbasis akrual**

Terdapat lima tujuan utama penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, yaitu:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Dengan mencatat seluruh transaksi, baik yang bersifat kas maupun non-kas, sistem ini mampu memberikan gambaran utuh atas aktivitas ekonomi pemerintah. Informasi yang tersaji memperlihatkan bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan kepada masyarakat dan otoritas terkait.
2. Menyediakan informasi yang lebih menyeluruh. Sistem akrual menampilkan data mengenai aset, kewajiban, pendapatan, serta beban secara lebih detail dibandingkan dengan basis kas, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi keuangan yang lebih nyata dan akurat.
3. Menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah. Dengan adanya pengakuan pendapatan dan beban secara akrual, pemerintah dapat menilai tingkat efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran publik, sekaligus mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran. Informasi keuangan yang lengkap dan tepat waktu dari sistem akrual dapat digunakan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sehingga alokasi sumber daya publik menjadi lebih rasional dan terukur.
5. Mendukung proses pengambilan keputusan. Data keuangan yang dihasilkan melalui sistem akrual memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan di berbagai level pemerintahan, termasuk pada unit terkecil seperti kecamatan.

#### **Manfaat sistem akuntansi berbasis akrual**

Manfaat penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi keuangan yang lebih akurat. Sistem ini mencatat seluruh transaksi serta peristiwa ekonomi pada saat terjadi, termasuk transaksi non-kas seperti piutang, utang, depresiasi aset, maupun amortisasi. Dengan demikian, kondisi keuangan yang ditampilkan mencerminkan keadaan sebenarnya.
2. Meningkatkan pengelolaan aset. Melalui akuntansi akrual, aset tetap seperti gedung kantor, kendaraan dinas, dan perlengkapan kerja wajib dicatat, disusutkan, serta dikelola dengan sistematis, sehingga mendorong adanya pengendalian aset yang lebih tertib.
3. Menunjukkan beban secara lebih realistis. Contohnya, belanja pegawai maupun belanja barang dicatat sebagai beban pada periode terjadinya, bukan hanya saat pembayaran dilakukan. Hal ini menggambarkan kewajiban fiskal yang sesungguhnya.
4. Memperkuat disiplin dan pengawasan anggaran. Karena pencatatannya lebih detail dan komprehensif, sistem akrual memudahkan identifikasi terhadap pemborosan, pengeluaran di luar rencana, maupun potensi penyimpangan penggunaan anggaran.
5. Meningkatkan kualitas opini laporan keuangan. Jika diimplementasikan secara tepat, sistem ini berpotensi memperbaiki mutu laporan keuangan pemerintah daerah dan mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.



6. Menjadi sarana pertanggungjawaban publik. Masyarakat berhak mengetahui pengelolaan dana publik. Dengan laporan berbasis akrual, informasi yang disajikan lebih andal dan dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban kepada publik.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai proses penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Kantor Camat Gomo, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kantor Camat Gomo yang beralamat di Jalan Sifaoroasi, Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan. Adapun waktu penelitian berlangsung mulai tanggal 25 Juli sampai dengan 19 Agustus 2025

### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data primer, yang berasal dari hasil wawancara dan observasi langsung di Kantor Camat Gomo, Kabupaten Nias Selatan.
- b. Data sekunder, yang diperoleh dari dokumen resmi berupa laporan keuangan, ketentuan perundang-undangan, serta referensi pustaka yang berkaitan dengan sistem akuntansi berbasis akrual.

### **Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Menurut Sugiyono, observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat secara sistematis fenomena yang sedang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti terlibat dalam kegiatan, atau non-partisipatif, yaitu peneliti hanya sebagai pengamat dari luar. Tujuan observasi adalah memperoleh gambaran nyata dan objektif mengenai kondisi lapangan.

#### **b. Wawancara**

Lexy J. Moleong (2017) menyatakan bahwa wawancara adalah bentuk percakapan yang memiliki tujuan tertentu, dilakukan antara pewawancara (interviewer) dengan pihak yang diwawancarai (interviewee). Dalam prosesnya, pewawancara mengajukan pertanyaan secara terstruktur, sedangkan responden memberikan jawaban berdasarkan pengalaman, pengetahuan, atau pandangannya. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam, fleksibel, dan tidak selalu formal, disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang ingin diperoleh.

#### **c. Dokumentasi**

Arikunto (2010) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui bahan tertulis seperti arsip, buku, laporan, notulen, maupun peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi yang telah tersedia sebelumnya, sehingga membantu dalam memahami konteks dan latar belakang permasalahan secara lebih menyeluruh.

### **Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap pegawai maupun pihak terkait di Kantor Camat Gomo yang berhubungan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual. Analisis data dilakukan secara sistematis dan bertahap, dengan tujuan menggali pemahaman lebih mendalam mengenai proses implementasi, hambatan yang dihadapi, serta faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Salah satu teknik pengumpulan data adalah wawancara, Pada tanggal 12 Agustus 2025 Peneliti melakukan wawancara Dengan Ibu Yuliana Giawa Sebagai Kasubbag Keuangan di Kantor Camat Mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual. Berikut Adalah Hasil Wawancaranya :

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Kantor Camat Gomo?

“Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Kantor Camat Gomo sudah mengikuti ketentuan yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam praktiknya, setiap transaksi dicatat tidak hanya pada saat kas diterima atau dikeluarkan, tetapi juga ketika hak dan kewajiban timbul. Misalnya, apabila ada belanja barang dan jasa, pencatatan dilakukan ketika dokumen pertanggungjawaban (SPJ) sudah diverifikasi meskipun pembayaran belum dilakukan sepenuhnya.”

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual?

“Kendala yang kami hadapi adalah masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap teknis pencatatan berbasis akrual. Banyak pegawai yang terbiasa dengan sistem kas (cash basis), sehingga perlu pelatihan khusus. Selain itu, sarana pendukung seperti aplikasi keuangan terkadang mengalami gangguan jaringan.”

3. Bagaimana dukungan pemerintah daerah dalam mendukung penerapan akuntansi akrual?

“Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memberikan dukungan berupa bimbingan teknis (bimtek) dan supervisi dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, ada juga pendampingan dari inspektorat dalam hal pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan.”

4. Bagaimana dampak penerapan akuntansi akrual terhadap laporan keuangan kantor camat Gomo?

“Dengan akuntansi akrual, laporan keuangan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Aset, kewajiban, pendapatan, dan belanja dapat terlihat lebih jelas. Hal ini membantu camat dalam mengambil keputusan dan juga memudahkan proses audit.”

5. Bagian mana yang paling sulit diterapkan dalam sistem akrual (misalnya penyusutan aset, piutang, kewajiban)?

“Bagian yang paling sulit diterapkan dalam sistem akrual di Kantor Camat Gomo adalah pencatatan penyusutan aset tetap. Hal ini disebabkan karena data aset yang ada belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik, terutama terkait nilai perolehan dan umur manfaat. Selain itu, pencatatan piutang dan kewajiban juga menjadi kendala karena selama ini transaksi lebih sering dicatat berbasis kas, sehingga pengakuan hak dan kewajiban masih belum konsisten sesuai dengan standar akrual. Kesulitan ini juga diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia yang belum seluruhnya menguasai akuntansi berbasis akrual.”

6. Apa harapan ke depan terkait penerapan sistem ini?

“Harapan kami adalah agar seluruh aparat kecamatan mendapat pemahaman yang lebih baik melalui pelatihan rutin. Selain itu, kami berharap ada penyempurnaan aplikasi akuntansi agar lebih mudah digunakan dan dapat meminimalisir kesalahan pencatatan.”

Berdasarkan wawancara dengan Kasubbag Keuangan di Kantor Camat Gomo, diketahui bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada dasarnya sudah dijalankan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sistem akuntansi berbasis akrual ini mencatat setiap transaksi tidak hanya saat kas diterima atau dibayarkan, tetapi juga ketika hak dan kewajiban timbul. Misalnya, untuk pengeluaran belanja barang dan jasa, pencatatan dilakukan setelah dokumen pertanggungjawaban diverifikasi meskipun pembayaran belum sepenuhnya direalisasikan.

Dalam pelaksanaannya, aparatur kecamatan menghadapi beberapa kendala. Kendala utama adalah terbatasnya pemahaman teknis tentang akuntansi berbasis akrual, karena sebagian aparatur sebelumnya lebih familiar dengan sistem berbasis kas. Selain itu, sarana pendukung seperti aplikasi keuangan kadang mengalami masalah teknis, terutama gangguan jaringan, sehingga memengaruhi kelancaran proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terus memberikan dukungan dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek), supervisi dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, serta pendampingan dari Inspektorat Daerah dalam proses pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur kecamatan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual secara tepat dan berkesinambungan. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual juga memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan Kantor Camat Gomo. Laporan keuangan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Penyajian informasi mengenai aset, kewajiban, pendapatan, serta belanja dapat disajikan secara lebih jelas, sehingga mempermudah pimpinan kecamatan dalam pengambilan keputusan serta mendukung proses audit yang dilakukan oleh pihak terkait. Adapun harapan ke depan adalah agar seluruh aparatur kecamatan memperoleh peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang lebih intensif, sehingga pemahaman mengenai sistem akuntansi berbasis akrual semakin baik. Selain itu, diperlukan penyempurnaan pada aplikasi keuangan yang digunakan agar lebih praktis dan mampu meminimalisir kesalahan pencatatan. Dengan demikian, tujuan utama penerapan sistem akuntansi berbasis akrual,



yaitu mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance, dapat terwujud secara optimal.

Menurut Sugiyono (2018: 231), wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan tujuan memperoleh informasi dari informan yang memiliki kompetensi. Sedangkan Moleong (2019: 186) menyatakan bahwa wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, pemikiran, serta pandangan informan mengenai topik penelitian.

Berdasarkan teori tersebut, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk wawancara semi-terstruktur, yaitu peneliti telah menyiapkan pedoman pertanyaan, tetapi tetap memberi ruang kebebasan bagi informan untuk menjawab sesuai pengalaman mereka.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa:

- a) Penerapan akrual sudah sesuai dengan SAP (PP No.71 Tahun 2010).
- b) Kendala utama adalah keterbatasan SDM, kurangnya pelatihan, dan lemahnya sistem informasi.
- c) Solusi yang diharapkan adalah peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan penguatan infrastruktur sistem keuangan.

Dengan demikian, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Kantor Camat Gomo dapat dikatakan cukup baik, meskipun masih memerlukan upaya perbaikan pada aspek sumber daya manusia dan sarana pendukung.

### **Kelebihan dan Kendala Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Kantor Camat Gomo**

#### **1. Kelebihan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Kantor Camat Gomo**

- a. Transparansi lebih baik – setiap transaksi keuangan dapat dicatat lebih rinci, tidak hanya saat kas diterima atau dibayarkan.
- b. Akuntabilitas meningkat – laporan keuangan dapat menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas kecamatan secara lebih jelas.
- c. Informasi lebih lengkap – laporan yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan arus kas, tetapi juga kondisi keuangan secara menyeluruh (misalnya adanya piutang atau kewajiban yang belum dilunasi).
- d. Mendukung pengambilan keputusan – pimpinan kecamatan bisa mengetahui kondisi riil keuangan sehingga lebih tepat dalam menentukan kebijakan.
- e. Kesesuaian dengan regulasi – penerapan ini mengikuti ketentuan PP No. 71 Tahun 2010, sehingga laporan keuangan kecamatan lebih standar dan sejalan dengan aturan pemerintah.

#### **2. Kendala Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Kantor Camat Gomo**

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) – tidak semua staf keuangan memahami secara mendalam konsep akuntansi berbasis akrual, sehingga masih terjadi kesalahan pencatatan.
- b. Kesulitan dalam pengelolaan aset – banyak aset kecamatan belum memiliki data nilai perolehan yang jelas, sehingga penyusutan sulit dihitung secara akurat.
- c. Piutang dan kewajiban kurang terdokumentasi – pencatatan piutang dan kewajiban belum optimal karena biasanya baru diakui pada saat kas diterima atau dibayarkan.
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana – jaringan internet dan perangkat lunak pendukung (misalnya SIMDA/SIPKD) kadang tidak berjalan optimal di tingkat kecamatan.
- e. Kurangnya monitoring dan evaluasi rutin – pengawasan dari instansi terkait belum dilakukan secara konsisten, sehingga kendala teknis sering berulang.

### **Pembahasan**

#### **Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Kantor Camat Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten**

Berdasarkan hasil wawancara, penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual di Kantor Camat Gomo telah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta pedoman yang diberikan oleh BPKPAD Kabupaten Nias Selatan. Dalam praktiknya, Kantor Camat Gomo menggunakan basis akrual, yaitu pendapatan dicatat ketika hak atau kewajiban muncul meskipun kas belum diterima atau dibayarkan. Proses penerapan di kecamatan ini dimulai dengan pencatatan setiap transaksi keuangan melalui dokumen sumber seperti SPP, SPM, kwitansi, dan bukti setor, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

#### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menampilkan ringkasan mengenai asal, distribusi, serta penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Laporan ini juga memperlihatkan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Adapun komponen utama yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan : seluruh penerimaan kas di Kantor Camat Gomo yang meningkatkan ekuitas dana serta menjadi hak pemerintah kecamatan tanpa adanya kewajiban untuk dikembalikan.
- b. Belanja : setiap pengeluaran anggaran yang dilakukan Kantor Camat Gomo dalam satu tahun anggaran guna menunjang pelaksanaan tugas serta fungsi pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Gomo.
- c. Selisih : perbedaan antara anggaran belanja yang telah ditetapkan untuk Kantor Camat Gomo dalam APBD dengan realisasi belanja yang benar-benar terjadi selama periode pelaporan. Selisih ini dapat menunjukkan apakah anggaran digunakan sepenuhnya, masih terdapat sisa (surplus), atau justru terjadi kekurangan anggaran (defisit).

**Tabel 2 1 LRA**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih	Persentase realisasi %
<b>Pendapatan</b>				
Pendapatan Daerah	Rp. 8.000.000	0,00	-Rp. 8.000.000	<b>0</b>
Pendapatan Asli Daerah	Rp. 8.000.000	0,00	-Rp. 8.000.000	<b>0</b>
Retribusi Daerah	Rp. 8.000.000	0,00	-Rp. 8.000.000	<b>0</b>
<b>Total Pendapatan</b>	<b>Rp. 24.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-Rp. 24.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Belanja</b>				
Belanja Daerah	Rp. 161.080.190	Rp. 55.770.485	<b>-Rp. 105.309.705</b>	<b>34,62</b>
Belanja Operasi	Rp. 161.080.190	Rp. 55.770.485	<b>-Rp. 105.309.705</b>	<b>34,62</b>
Belanja Pegawai	Rp. 380.000	0,00	<b>-Rp. 380.000</b>	<b>0</b>
Barang dan Jasa	Rp. 161.079.810	Rp. 55.770.485		<b>34,62</b>
Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Total Belanja</b>	<b>Rp. 483.620.190</b>	<b>Rp. 167.311.485</b>	<b>-Rp. 316.308.705</b>	<b>34,59</b>
Surplus/Defisit	Rp. 153.080.190	Rp. 55.770.485	<b>Rp. 97.309.707</b>	<b>36,43</b>

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Gomo untuk periode 1 Januari hingga 30 Juni 2025, terlihat bahwa kinerja pengelolaan anggaran pada semester pertama tahun 2025 masih belum mengalami peningkatan yang berarti dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pada sisi pendapatan, anggaran yang diproyeksikan sebesar Rp 24.000.000 tidak terealisasi sama sekali hingga pertengahan tahun, sehingga tingkat realisasinya hanya mencapai 0%. Kondisi ini mencerminkan bahwa target pendapatan tidak tercapai serta menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan pemungutan, baik dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari penerimaan lainnya. Dari sisi belanja, total anggaran belanja sebesar Rp 483.620.190 telah terealisasi sebesar Rp 316.308.705 atau sekitar 65,43% dari target anggaran. Persentase ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga anggaran belanja belum terserap, yang dapat diartikan adanya keterlambatan pelaksanaan program atau penundaan kegiatan. Meskipun rendahnya penyerapan dapat mencerminkan efisiensi, namun dalam konteks pelaksanaan program kerja, hal ini berpotensi menghambat pencapaian target kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, kondisi surplus/defisit pada periode ini menunjukkan defisit sebesar Rp 316.308.705. Defisit ini disebabkan oleh tidak adanya realisasi pendapatan, sementara belanja tetap dilakukan. Keadaan ini berimplikasi pada ketergantungan terhadap sumber pembiayaan lain di luar



pendapatan murni. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja realisasi anggaran Kecamatan Gomo pada periode 1 Januari–30 Juni 2025 belum optimal. Diperlukan upaya perbaikan dalam strategi pencapaian pendapatan serta percepatan pelaksanaan program kerja agar target anggaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.

## 2. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan salah satu laporan pokok dalam akuntansi pemerintahan yang berisi informasi mengenai seluruh pendapatan, beban, surplus atau defisit dari aktivitas operasional, serta pos-pos luar biasa dalam satu periode pelaporan.

Pada tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kantor Camat Gomo, laporan ini berfungsi untuk menunjukkan kinerja keuangan berbasis akrual, di mana pendapatan dan beban dicatat pada saat timbulnya transaksi, bukan ketika kas diterima atau dikeluarkan.

**Tabel 3 Operasional**

Uraian	2025	2024	Selisih	Persentase %
<b>Pendapatan</b>				
Pendapatan Asli Daerah ( PAD )-LO	0,00	Rp. 8.000.000	-Rp. 8.000.000	100
Retribusi Daerah	0,00	Rp. 8.000.000	-Rp. 8.000.000	100
Retribusi Jasa Umum	0,00	Rp. 8.000.000	-Rp. 8.000.000	100
Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	Rp. 8.000.000	-Rp. 8.000.000	100
Restribusi Los	0,00	Rp. 8.000.000	-Rp. 8.000.000	100
Jumlah Pendapatan Asli Daerah ( PAD )	0,00	Rp. 8.000.000	-Rp. 8.000.000	100
<b>Total Pendapatan</b>	0,00	Rp. 40.000.000	-Rp. 40.000.000	100
<b>Beban</b>	Rp. 55.770.485	Rp. 332.610.210	-Rp. 276.839.725	83,23
Beban Operasi	Rp. 55.770.485	Rp. 332.610.210	-Rp. 272.038.975	82,98
Beban Pegawai	0,00	Rp. 25.320.000	-Rp. 25.320.000	100
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	Rp. 25.320.000	-Rp. 25.320.000	100
Beban Honorarium	0,00	Rp. 25.320.000	-Rp. 25.320.000	100
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	0,00	Rp. 25.320.000	-Rp. 25.320.000	100
Beban Barang dan Jasa	Rp. 55.770.485	Rp. 302.489.460	-Rp. 246.718.975	81,56
Beban Barang	Rp. 14.120.485	Rp. 147.281.460	-Rp. 133.160.975	90,41

Beban Barang Pakai Habis	Rp. 14.120.485	Rp. 144.276.860	-Rp. 130.156.375	90,21
Beban Alat Tulis Kantor	Rp. 8.870.485	Rp. 55.189.750	-Rp. 46.319.265	83,92
Beban Alat Bahan Cetak	0,00	Rp. 15.622.110	-Rp. 15.622.110	100
Beban Alat Benda Pos	0,00	Rp. 2.000.000	-Rp. 2.000.000	100
Beban Alat Listrik	0,00	Rp. 3.866.400	-Rp. 3.866.400	100
Beban Makanan dan Minum Rapat	Rp. 5.250.000	Rp. 32.690.600	-Rp. 27.448.600	83,94
BMM Jamuan Tamu	0,00	Rp. 12.600.000	-Rp. 12.600.000	100
Beban Paskibraka	0,00	Rp. 22.300.000	-Rp. 22.300.000	100
Beban Aset Tetap yang tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	Rp. 3.004.000	-Rp. 3.004.000	100
Beban Peralatan, Mesin dan Alat Pembersih	0,00	Rp. 3.004.000	-Rp. 3.004.000	100
<b>Beban Jasa</b>	Rp. 17.500.000	Rp. 46.000.000	-Rp. 28.500.000	61,95
Beban Jasa Kantor	Rp. 17.500.000	Rp. 46.000.000	-Rp. 28.500.000	61,95
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	Rp. 10.000.000	-Rp. 10.000.000	100
Beban Jasa Administrasi	Rp. 5.000.000	Rp. 36.000.000	Rp. 31.000.000	86,11
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Rp. 5.000.000	0,00	Rp. 5.000.000	100
Beban Jasa Tenaga Keamanan	Rp. 7.500.000	0,00	Rp. 7.500.000	1 00
Beban Perjalanan Dinas	Rp. 24.150.000	Rp. 109.208.000	-Rp. 85.058.000	77,88
Beban Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp. 24.150.000	Rp. 109.208.000	-Rp. 85.058.000	77,88
Beban Perjalanan Dinas Biasa	0,00	Rp. 15.988.000	-Rp. 15.988.000	100
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	Rp. 24.150.000	Rp. 93.220.000	-Rp. 69.070.000	74,09
<b>Jumlah Beban Operasi</b>	Rp. 55.770485	Rp. 327.809.460	-Rp. 272.038.975	82,98



Beban Penyusutan dan Armotisasi	0,00	Rp. 4.800.750	-Rp. 4.800.750	100
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	Rp. 2.661.750	-Rp. 2.661.750	100
Beban Penyusutan Komputer	0,00	Rp. 2.661.750	-Rp. 2.661.750	100
Beban Penyusutan Komputer Unit- Personal Computer	0,00	Rp. 2.661.750	-Rp. 2.661.750	100
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	Rp. 2.139.000	-Rp. 2.139.000	100

Berdasarkan data kinerja keuangan, total pendapatan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp 0,00, sedangkan pada tahun 2024 mencapai Rp 40.000.000. Dengan demikian, terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp 40.000.000. Penurunan ini sepenuhnya disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada pos retribusi daerah yang tidak terealisasi sama sekali pada tahun 2025.

Dari sisi beban, total beban pada tahun 2025 sebesar Rp 55.770.485, sedangkan pada tahun 2024 sebesar Rp 332.610.210, sehingga terdapat selisih penurunan sebesar Rp 276.839.725. Selisih terbesar terdapat pada beban barang dan jasa, yang berkurang sebesar Rp 246.718.975. Selain itu, beban perjalanan dinas berkurang sebesar Rp 85.058.000, dan beban penyusutan berkurang Rp 4.800.750. Beberapa pos beban yang terdapat pada tahun 2024, seperti beban pegawai, beban jamuan tamu, beban Paskibraka, beban alat bahan cetak, serta beberapa jenis beban jasa, tidak lagi muncul pada tahun 2025.

Dengan demikian, meskipun terdapat penghematan yang cukup besar di sisi beban, penurunan pendapatan sebesar Rp 40.000.000 hingga menjadi Rp 0,00 pada tahun 2025 menjadi catatan penting yang perlu dianalisis lebih lanjut, karena dapat berpengaruh terhadap kemampuan pembiayaan kegiatan pemerintahan di tahun berjalan.

#### Kesesuaian SAKD Kantor Camat Gomo

Di tingkat kecamatan, termasuk Kantor Camat Gomo, sistem akuntansi yang diterapkan umumnya mengikuti sistem akuntansi berbasis akrual sesuai PP No. 71 Tahun 2010. Namun, implementasinya memiliki kelebihan sekaligus kendala:

**Tabel 4 Kesesuaian SAKD**

Kriteria PP 71/2010	Penjelasan PP 71/2010	Kondisi di Kantor Camat Gomo	Kesesuaian
<b>Relevan</b>	Laporan keuangan bermanfaat bagi pengambilan keputusan, evaluasi, dan akuntabilitas publik.	Laporan keuangan digunakan sebagai dasar evaluasi anggaran kecamatan, pembangunan desa, dan pelayanan masyarakat.	<input checked="" type="checkbox"/> Sesuai
<b>Andal</b>	Informasi jujur, bebas dari kesalahan material, dan dapat diverifikasi.	Pencatatan transaksi keuangan dilakukan sesuai aturan BPKD dengan bukti transaksi (SPJ, kwitansi, dll.), namun kadang ada keterlambatan pelaporan.	Sebagian sesuai (kendala teknis)

Kriteria PP 71/2010	Penjelasan PP 71/2010	Kondisi di Kantor Camat Gomo	Kesesuaian
Dapat dibandingkan	Laporan bisa dibandingkan antar periode & antar entitas pemerintah.	Format laporan mengikuti SAP Kabupaten Nias Selatan, sehingga dapat dibandingkan dengan kecamatan lain maupun tahun sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/> Sesuai
Dapat dipahami	Informasi harus jelas dan mudah dimengerti pengguna laporan.	Laporan disusun dengan format standar (LRA, Neraca, LO, LAK, CaLK). Namun pemahaman aparatur masih terbatas karena latar belakang akuntansi belum merata.	Sebagian sesuai
Basis Akrual	Pencatatan berbasis akrual (mencatat hak & kewajiban, bukan hanya kas).	Mulai diterapkan sesuai SAP. Namun, praktiknya masih dominan kas menuju akrual karena keterbatasan SDM & aplikasi.	Belum sepenuhnya sesuai

#### 1. Relevansi

Kualitas laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Di Kantor Camat Gomo, laporan keuangan memiliki tingkat relevansi yang tinggi karena digunakan sebagai dasar untuk menilai realisasi anggaran, pelaksanaan pembangunan desa, dan efektivitas pelayanan publik. Dengan demikian, laporan keuangan yang disusun memberikan kontribusi nyata dalam perencanaan dan pengendalian keuangan.

#### 2. Keandalan

Informasi yang andal harus disajikan dengan jujur, dapat diverifikasi, dan bebas dari kesalahan material. Kantor Camat Gomo menyusun laporan keuangan berdasarkan dokumen sumber (SPJ, kwitansi, bukti belanja, dan dokumen pertanggungjawaban lainnya) yang diverifikasi secara berjenjang oleh aparat kecamatan dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa keterlambatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban dan keterbatasan SDM yang memahami akuntansi pemerintahan. Kondisi ini menyebabkan keandalan laporan masih belum optimal meskipun secara prinsip sudah sesuai dengan ketentuan PP 71/2010.

#### 3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan sebaiknya dapat dibandingkan baik antarperiode maupun antarinstansi. Di Kantor Camat Gomo, laporan keuangan disusun menggunakan format standar yang ditetapkan pemerintah kabupaten sesuai dengan SAP berbasis akrual. Hal ini memungkinkan laporan kecamatan untuk dibandingkan dengan laporan tahun-tahun sebelumnya maupun dengan kecamatan lain di Kabupaten Nias Selatan. Dengan demikian, dari sisi keterbandingan, penerapan sistem akuntansi di Kantor Camat Gomo sudah sesuai dengan ketentuan PP No. 71 Tahun 2010.

#### 4. Dapat dipahami

Kriteria ini menuntut agar laporan keuangan dapat dimengerti oleh pengguna, baik masyarakat umum maupun pihak pemeriksa. Laporan keuangan di Kantor Camat Gomo terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disusun dalam format standar. Hal ini mendukung keterpahaman bagi pengguna laporan. Namun, karena keterbatasan pemahaman sebagian aparatur kecamatan yang tidak berlatar belakang akuntansi, proses penyusunan laporan sering bergantung pada bimbingan teknis dari kabupaten.

#### 5. Basis Akrual

PP No. 71 Tahun 2010 mewajibkan pemerintah menggunakan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Kantor Camat Gomo pada dasarnya sudah menerapkan sistem berbasis akrual sesuai dengan aturan, karena pencatatan dan pelaporan dilakukan melalui aplikasi keuangan daerah



yang dikendalikan oleh kabupaten. Namun, dalam praktiknya, sebagian aparatur masih lebih familiar dengan pencatatan berbasis kas, sehingga implementasi basis akrual masih belum sepenuhnya optimal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan adalah : Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Kantor Camat Gomo telah dilaksanakan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 , sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman SDM, pencatatan aset tetap yang belum optimal, serta pemanfaatan teknologi informasi yang terbatas. Faktor komitmen pimpinan, regulasi, pengawasan internal, dan dukungan sistem informasi menjadi penentu keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual di kecamatan.

### Saran

Untuk meningkatkan kualitas penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Camat Gomo, disarankan agar pemerintah daerah memberikan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur, memperkuat sistem informasi akuntansi, serta mengoptimalkan pengawasan internal dan Laporan Keuangan Harus di Lengkapi Sesuai Dengan PP No.71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8) Selain itu, pimpinan kecamatan perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam mendorong kedisiplinan aparatur dan konsistensi penerapan akuntansi berbasis akrual agar kualitas laporan keuangan semakin meningkat..

## DAFTAR PUSTAKA

- Alrahim, A. A., & Wibowo, P. (2022). Analisis manfaat laporan keuangan berbasis AKRUAL dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Kabupaten Bantaeng. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 7(3), 80–93. <https://doi.org/10.29407/jae.v7i3.18579>
- Feni Pirani, Muhamad Rifandi, & Choirul Anam. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kaulitas Laporan Keuangan di SKPD Kabupaten Bantul. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(6), 385–397. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i6.1734>
- Lubis, N., & Nurlaila, N. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(2), 467–472. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.1522>
- Nasution, P. W., Wulandari, T., Nasirwan, Suhandi, & Hasanah, N. (2024). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 26–32.
- Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 85–98. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071>
- Satya, V. E. (2023). The Implementation of Accrual Base Government Accounting System in West Java Province. *Kajian*, 25(2), 145–160. <http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/>
- Ternalemta, Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 12(2), 264–275.

- Alrahim, A. A., & Wibowo, P. (2022). Analisis manfaat laporan keuangan berbasis AKRUAL dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Kabupaten Bantaeng. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 7(3), 80–93. <https://doi.org/10.29407/jae.v7i3.18579>
- Feni Pirani, Muhamad Rifandi, & Choirul Anam. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kaulitas Laporan Keuangan di SKPD Kabupaten Bantul. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(6), 385–397. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i6.1734>
- Lubis, N., & Nurlaila, N. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(2), 467–472. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.1522>
- Nasution, P. W., Wulandari, T., Nasirwan, Suhandi, & Hasanah, N. (2024). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua Terhadap laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 26–32.
- Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 85–98. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071>
- Satya, V. E. (2023). The Implementation of Accrual Base Government Accounting System in West Java Province. *Kajian*, 25(2), 145–160. <http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/>
- Ternalemta, Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 12(2), 264–275.